

PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP 2018



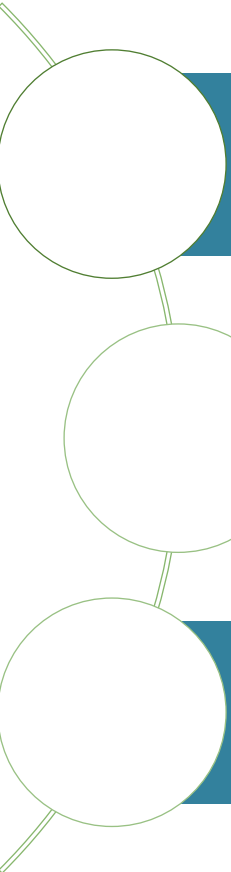
Jakarta 13 Januari 2017

CAPAIAN TARGET PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RPJMN 2015-2019)

Kegiatan	Satuan	2014 (Baseline)	2015		2016 ¹		Persentase Perkiraan Capaian 2019	Perkiraan Capaian 2019 (notifikasi)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni (Kontribusi Pemerintah hanya 2,2 juta rumah tangga) ²	Rumah tangga	7,6 juta	172.650	127.643	361.300	105.331	42%	●
Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan	Ha	38.431	1.610	3.140	8.975	2.162	64%	●
Akses Air Minum Layak	Persen	70,00	70,25	70,97	77,00	77,60	100	●
Akses Sanitasi (Air Limbah)	Persen	69,42	72,20	71,93	77,40	76,08	100	
- Akses Layak		61,06	62,41	62,14	66,30	67,20	85	●
- Akses Dasar		8,34	9,79	9,79	11,10	8,88	15	

1. Prognosa RKP 2016. Untuk FLPP 2016, sudah termasuk pembayaran untuk realisasi KPR yang diterbitkan tahun 2015 (tunggakan). Capaian akses air minum dan sanitasi diolah dari data mentah Susenas 2016.
2. Untuk mengurangi backlog dari 7,6 juta menjadi 5 juta dibutuhkan pembangunan baru sebanyak 4,4 juta unit, termasuk untuk penambahan rumah tangga baru. Sebanyak 2,2 juta unit dipenuhi melalui kontribusi pemerintah, sementara 2,2 juta unit lainnya diharapkan dapat disediakan oleh swasta dan masyarakat.

Permasalahan Pembangunan Perumahan



Penyediaan rumah layak bagi MBR oleh pemerintah/swasta vs preferensi masyarakat mengenai rumah layak (lokasi, tipe rumah, konektivitas, dll)

Persyaratan pengajuan kredit kepemilikan rumah yang belum mengakomodir Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

Permasalahan Penyelenggaraan Layanan Air Minum dan Sanitasi

Air Minum



- ☐ Keberlanjutan akses layanan non-PDAM rendah
- ☐ Kapasitas & manajemen layanan air minum belum optimal
- ☐ Manajemen aset belum tertata dengan baik

Sanitasi



- ☐ Kesadaran terhadap pentingnya sanitasi masih sangat rendah
- ☐ Kapasitas & manajemen layanan sanitasi belum optimal
- ☐ Manajemen aset belum tertata dengan baik (khususnya sistem skala kawasan)

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau melalui penciptaan iklim kondusif dalam penyediaan perumahan, penyediaan hunian baru, fasilitasi peningkatan kualitas hunian, serta fasilitasi pembiayaan perumahan.
2. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman melalui perencanaan dan penataan kawasan permukiman.
3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat.
4. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air

KEBIJAKAN TERKAIT REVOLUSI MENTAL

1. Perilaku hemat air
2. Stop buang sampah di sungai dan saluran
3. Stop buang air besar sembarangan (langsung dan tidak langsung)
4. Tertib pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Gerakan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)
6. Gerakan menabung untuk perumahan

ARAH KEBIJAKAN

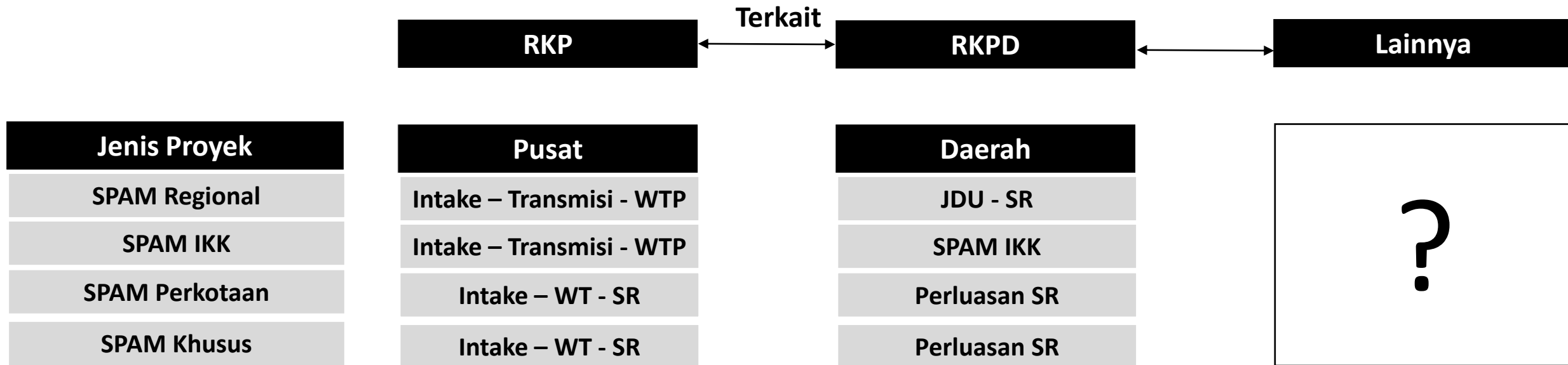


SASARAN UMUM PN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN





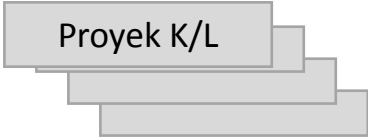
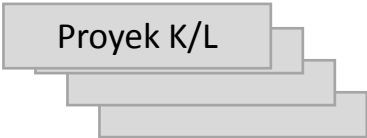
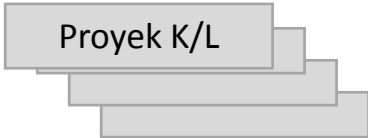
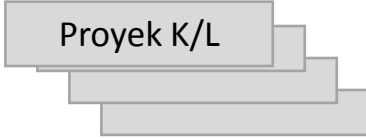
INDIKATOR	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	Sasaran Akhir RPJMN 2019
Akses Air Minum Layak (%)	70,00	70,25	77,00	84,00	92,00	100,00
Akses Sanitasi Layak (%)	69,42	72,20	77,40	83,20	91,60	100,00
	Akses layak 61,1 Akses dasar 8,34	Akses layak 62,4 Akses dasar 9,8	Akses layak 66,3 Akses dasar 11,1	Akses layak 70,7 Akses dasar 12,4	Akses layak 77,85 Akses dasar 13,7	Akses layak 85,0 Akses dasar 15,0
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 100%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 85%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 70%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 45%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 15%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 0%)
	Perencanaan Penanganan 0 kab/kota	Perencanaan Penanganan 116 kab/kota	Perencanaan Penanganan 96 kab/kota	Perencanaan Penanganan 121 kab/kota	Perencanaan Penanganan 0 kab/kota	Perencanaan Penanganan 0 kab/kota
Kekurangan Tempat Tinggal berdasarkan Perspektif Menghuni	7,6 Juta Rumah Tangga	7,0 Juta Rumah Tangga	6,5 Juta Rumah Tangga	6,0 Juta Rumah Tangga	5,5 Juta Rumah Tangga	5,0 Juta Rumah Tangga

ILUSTRASI KETERKAITAN RKP DAN RKPD

Contoh ilustrasi Kegiatan Air Minum



PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR	Pengentasan Permukiman Kumuh
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Reformasi Administrasi Pertanahan dan Perizinan Pembangunan Perumahan	Penyediaan Hunian Vertikal beserta PSU	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Sisi Permintaan	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Standar Bangunan	Penyediaan Rumah Khusus beserta PSU	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Sisi Pasokan	Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengembangan Sistem Informasi Bantuan Perumahan	Fasilitasi Penyediaan Rumah Swadaya beserta PSU		
Pengembangan Sistem Pembiayaan Primer dan Sekunder Perumahan			
			
Proyek K/L 	Proyek K/L 	Proyek K/L 	Proyek K/L 
LOKASI PRIORITAS	LOKASI PRIORITAS	LOKASI PRIORITAS	LOKASI PRIORITAS
Nasional	Hunian vertikal: perkotaan, kawasan industri. Rumah khusus: perbatasan, wilayah pasca bencana, daerah tertinggal, pulau terpencil. Rumah swadaya: berdasarkan kapasitas fiskal daerah	Nasional	Perkotaan terutama Metropolitan

PEMILIHAN KRITERIA LOKASI PRIORITAS

Hunian Vertikal	Rusunawa	Kota Metropolitan: 12 kawasan Metropolitan (RPJMN 2015-2019) Kota Besar: 14 Kota Besar (PP No.26/2008) Kawasan Industri (fokus 2018): KI Morowali, KI Bantaeng, KI Sei Mangkei		
	Rusunami	Transit oriented development oleh Perumnas: Tanjung Barat, Pondok Cina, dan Bogor		
Pembinaan standar bangunan		Wilayah rawan bencana		
Rumah Khusus		Pasca bencana, pulau terpencil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan (tenaga medis, pendidik, dan petugas keamanan perbatasan)		
Rumah Swadaya		Berdasarkan kapasitas fiskal daerah		
		Kapasitas Fiskal	Kontribusi Pem. Pusat	Kontribusi Pem. Daerah
		Tinggi	50%	50%
		Sedang	60%	40%
		Rendah	75%	25%
Pengentasan kawasan kumuh		12 kawasan Metropolitan (tercantum dalam RPJMN 2015-2019)		

KEBUTUHAN PENDANAAN

PROGRAM PRIORITAS: PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK

Kegiatan Prioritas	Sumber Pendanaan	Anggaran yg Dibutuhkan	Sasaran	K/L
Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR	APBN	250 M	-	Kementerian PUPR PT Sarana Multi Infrastruktur PT Sarana Multigriya Finansial Otoritas Jasa Keuangan
Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR	APBN	17,56 T	187.318 unit	Kementerian PUPR Kementerian Desa PDTT
	DAK	3 T		
Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR	APBN	27 T	550.000 unit	Kementerian PUPR (BA 999)
Pengentasan Permukiman Kumuh	APBN	5,14 T	38.431 ha (kawasan kumuh perkotaan)	Kementerian PUPR

INDIKASI LOKASI PROYEK K/L DI **DAERAH SPESIFIK**

Lokasi	No	Proyek K/L	K/L
Perkotaan dan kawasan industri	1	PSO Selisih Tarif untuk Rusunawa	Kemenpupera
	2	Pembangunan Rumah Susun untuk MBR	Kemenpupera
Perbatasan, wilayah pasca bencana, pesisir, daerah tertinggal dan pulau kecil terluar	1	Pembangunan Rumah Pasca Bencana	Kemenpupera
	2	Pembangunan Rumah Dinas Petugas Perbatasan	Kemenpupera
	3	Pembangunan Rumah Nelayan	Kemenpupera
	4	Penanganan Kawasan Permukiman Khusus	Kemenpupera
	5	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu	Kemenpupera
Perkotaan terutama metropolitan	1	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Kemenpupera
	2	Penyusunan RTR KSN Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila)	Kementerian ATR/BPN
	3	Pembinaan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	Kementerian ATR/BPN

INDIKASI LOKASI PROYEK K/L NASIONAL

Lokasi	No	Proyek K/L	K/L
Nasional	1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan	Kemendagri
	2	Penyertaan modal kepada perumnas untuk penyediaan perumahan	Kemenpupera
	3	Peningkatan pendaftaran hak tanah dan guna tata ruang	Kementerian ATR/BPN
	4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kemenpupera
	5	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Gedung	Kemenpupera
	6	Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kemenpupera
	7	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Bangunan Gedung	Kemenpupera
	8	Sistem Informasi Penyediaan Perumahan	Kemenpupera
	9	Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	Kemenpupera
	10	Pendayagunaan Sumber-sumber Pembiayaan Perumahan	Kemenpupera
	11	Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Kemenpupera
	12	Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Kemenpupera
	13	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan - Rehabilitasi Sosial RTLH	Kemensos
	14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan - Rehabilitasi Sosial RTLH	Kemensos
	15	KPR Sejahtera Tapak yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan	Kemenpupera
	16	KPR Sarusun yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan	Kemenpupera
	17	KPR Sewa Beli untuk Sarusun yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan	Kemenpupera
	18	KPR Swadaya yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan	Kemenpupera
	19	Bantuan uang muka perumahan	Kemenpupera

INDIKASI LOKASI PROYEK K/L **NASIONAL**

Lokasi	No	Proyek K/L	K/L
Nasional	20	Bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT)	Kemenpupera
	21	Kebijakan, Strategi, Analisis Makro, dan Program Pembiayaan Perumahan	Kemenpupera
	22	MOU Kerjasama Pembiayaan Perumahan	Kemenpupera
	23	Materi Teknis Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan	Kemenpupera
	24	Rumusan Rapermen Pola Pembiayaan Perumahan	Kemenpupera
	25	Diseminasi Sistem Pembiayaan Perumahan	Kemenpupera
	26	Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Kemenpupera
	27	Rencana Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Pembiayaan Perumahan	Kemenpupera
	28	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan	Kemenpupera
	29	Promosi, Perencanaan, dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	Kemenpupera
	30	Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Kemenpupera
	31	Informasi, Evaluasi, dan Pembinaan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU)	Kemenpupera
	32	Kredit Konstruksi yang Difasilitasi Bantuan Pembiayaan	Kemenpupera
	33	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kemenpupera
	34	Penanganan Kawasan Permukiman Perdesaan	Kemenpupera

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL AIR BERSIH DAN SANITASI

Kegiatan Prioritas Nasional

Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

Proyek Prioritas Nasional

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terkait air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah

Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang terintegrasi terutama di daerah dengan akses rendah

Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah



Proyek K/L

Kriteria Pengelompokan Lokasi Proyek K/L

Daerah dengan akses air minum dan sanitasi dibawah rata-rata nasional*

Daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana, daerah transmigrasi

Lokasi Strategis

Kegiatan Prioritas Nasional

Peningkatan Ketersediaan Air Baku

Proyek Prioritas Nasional

Jaga Air : Peningkatan ketahanan sumber daya air domestik di 15 DAS prioritas

Simpan Air : Peningkatan ketersediaan dan kuantitas air di kota-kota besar dan metropolitan



Proyek K/L

Kriteria Pengelompokan Lokasi Proyek K/L

15 DAS Prioritas

Daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana, daerah transmigrasi

Kota Metropolitan dan Kota Besar

*Diluar Daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana, daerah transmigrasi

INDIKASI LOKASI PROYEK K/L DI DAERAH DAN KEBUTUHAN PENDANAAN			
Kriteria Lokasi	Proyek K/L	KL	Rp (Juta)
Lokasi dengan daerah akses air minum dan sanitasi di bawah rata-rata nasional (135 Kab/Kota)	Fasilitasi pelaksanaan Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) → Pilar 1,2, dan 3	Kemenkes	52.714
	Fasilitasi pelaksanaan STBM di perkotaan	Kemenkes	21.784
	Fasilitasi pelaksanaan bank sampah	KLHK	21.784
	Fasilitasi pemicuan di Sekolah	Kemenkes	25.408
	Penyediaan SPAM perdesaan	KemenPUPR (KemendesPDTT)	762.244
	Penyediaan SPAM perkotaan	KemenPUPR (optimalisasi SPAM IKK;moratorium pembangunan baru)	1.300.000
	Penyediaan SPAM kawasan khusus	KemenPUPR (KemendesPDTT, KKP, ESDM, Kemensos)	206.560
	Fasilitasi penyusunan dan peningkatan kualitas Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL	Kemendagri	300
	Fasilitasi penyusunan RPAM Operator	KemenPUPR	300
	Fasilitasi penyusunan RPAM Komunal	Kemenkes	300
	Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Proaksi (fasilitasi penyusunan dan peningkatan PJM Proaksi)	Kemendagri	300
	Pengembangan kelembagaan masyarakat pengelola sarana	KemendesPDTT	300
	Pengembangan kelembagaan pengelola sarana SPAM IKK, regional, khusus termasuk BUMD	KemenPUPR	300
	Pendampingan pengembangan layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)	KemenPUPR	32.000
	Pendampingan Penyusunan dan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK)	KemenPUPR	6.400
	Pendampingan Penyusunan Masterplan air limbah, persampahan, drainase	KemenPUPR	41.500
	Pendampingan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait AMPL	KemenPUPR	300
	Fasilitasi SPAM PDAM	KemenPUPR	300
	Fasilitasi SPAM Non-DAM	KemenPUPR	300
	Pembangunan IPAL kawasan	KemenPUPR	498.000
	Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah skala komunal/setempat di kawasan khusus	KemenPUPR	161.850
	Pembangunan IPAL USK di 15 DAS prioritas	KLHK	12.000
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	KemenPUPR	830.000
	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala Kab/Kota	KemenPUPR	830.000
	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Antara	KemenPUPR	350.000
	Pembangunan drainase perkotaan dan permukiman	KemenPUPR	1.245.000
	Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Kemendikbud	166.000

INDIKASI LOKASI PROYEK K/L DI DAERAH DAN KEBUTUHAN PENDANAAN			
Kriteria Lokasi	Proyek K/L	KL	Rp (Juta)
Daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana, daerah transmigrasi (162 Kab/Kota)	Fasilitasi pelaksanaan Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) → Pilar 1,2, dan 3	Kemenkes	102.886
	Fasilitasi pemicuan di Sekolah	Kemenkes	48.600
	Penyediaan SPAM perdesaan	KemenPUPR (KemendesPDTT)	2.250.000
	Penyediaan SPAM kawasan khusus	KemenPUPR (KemendesPDTT, KKP, ESDM, Kemensos)	136.000
	Fasilitasi penyusunan dan peningkatan kualitas Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL	Kemendagri	300
	Fasilitasi penyusunan RPAM Operator	KemenPUPR	300
	Fasilitasi penyusunan RPAM Komunal	Kemenkes	300
	Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Proaksi (fasilitasi penyusunan dan peningkatan PJM Proaksi)	Kemendagri	300
	Pengembangan kelembagaan masyarakat pengelola sarana	KemendesPDTT	300
	Pendampingan Penyusunan dan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK)	KemenPUPR	12.474
	Pendampingan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait AMPL	KemenPUPR	300
	Fasilitasi SPAM PDAM	KemenPUPR	300
	Fasilitasi SPAM Non-DAM	KemenPUPR	300
	Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah skala komunal/setempat di kawasan khusus	KemenPUPR	315.900
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	KemenPUPR	1.620.000
	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala Kab/Kota	KemenPUPR	1.620.000
	Pembangunan drainase perkotaan dan permukiman	KemenPUPR	2.430.000
	Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Kemendikbud	324.000

INDIKASI LOKASI PROYEK K/L DI DAERAH DAN KEBUTUHAN PENDANAAN			
Lokasi Strategis	Proyek K/L	KL	Rp (Juta)
Kab.Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab.Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Gresik	Penyediaan SPAM Umbulan	KemenPUPR	100.000
Kab.Wonogiri, Kota Surakarta, Kab.Sukoharjo, Kab.Karanganyar, Kab.Sragen	Penyediaan SPAM Wososukas	KemenPUPR	80.000
Kota Medan, Kab.Binjai, Kab.Deli serdang	Penyediaan SPAM Mebidang	KemenPUPR	80.000
Provinsi Lampung	Penyediaan SPAM Lampung	KemenPUPR	80.000
Kota Pekanbaru dan Kab.Kampar	Penyediaan SPAM Pekanbaru	KemenPUPR	80.000
Kota Makassar, Kab.Maros, Kab.Gowa, Kab. Takalar	Penyediaan SPAM Mamminasata	KemenPUPR	100.000
Kab.Bogor, Kota Bogor, Kota Depok	TPA Regional Nambo	KemenPUPR	250.000
Kota Manado, Kab.Minahasa, Kab.Minahasa Utara, dan Kab.Bitung	Pembangunan TPA Regional Mamitarung	KemenPUPR	250.000
Kota Palu dan Kab.Sigi	Pembangunan TPA Regional Sigi Palu	KemenPUPR	250.000
Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab.Banjar, Kab.Barito Kuala, dan Kab.Tanah Laut	Pembangunan TPA Banjar Bakula	KemenPUPR	250.000
Kota Denpasar	Denpasar <i>Sewerage</i> III	KemenPUPR	120.000
Kota Pekanbaru	IPAL Kota Pekanbaru	KemenPUPR	120.000
DKI Jakarta	Jakarta <i>sewerage</i>	KemenPUPR	3.500.000
Kota Palembang	IPAL Palembang	KemenPUPR	140.000
Kota Makassar	IPAL Makassar	KemenPUPR	130.000
Kota Jambi	IPAL Jambi	KemenPUPR	85.000

INDIKASI LOKASI PROYEK K/L DI DAERAH DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Lokasi	Proyek K/L	KL	Rp (Juta)
15 DAS Prioritas (Sungai Asahan Toba, Sungai Siak, Sungai Musi, Sungai Sekampung, Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung, Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, Sungai Serayu, Sungai Berantas, Sungai Kapuas, Sungai Jeneberang, Sungai Sadang, Danau Limboto)	Konservasi Sumber Daya Air	KLHK	225.000
	Pemantauan Kuliatas dan Penyediaan informasi data kualitas air sungai secara kontinyu	KLHK	75.000
	Pemantuan Kualitas effluent infrastruktur sanitasi	KLHK	12.000.000
	Pembangunan sumur resapan	KLHK	50.000
	Rehabiitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah	KLHK	
	Penyusunan RTR	KemenATR	15.000
	Pembangunan Dinding Penahan abrasi sungai	KemenPUPR	
Provinsi Bangka Belitung, Banten, gorontalo, Kalimantan Barat, NTT, Papua, Sulsel, Sulteng, Sumbar, Jambi, Jabar, NTB, Jatim	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Baku	KemenPUPR	437.722
Provinsi riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Papua, Maluku Utara, Maluku, Bali, NTT, NTB, Kalteng, Kalbar, Sultra, Sulteng, Sulsel, SULTenggara, Gorontalo	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	KemenPUPR	91.178
Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Riau, Lampung, Kep.Riau, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulut, Gorontalo, Sultengah, Sultenggara, Sulsel, Kalutara, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Kalteng	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku	KemenPUPR	13.753.883
Daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana, daerah transmigrasi	Pelaksanaan program Penampungan Air Hujan (PAH)	KemenPUPR	388.000
	Pembangunan waduk dan embung di wilayah rawan air	KemenPUPR	
Kota Metropolitan dan Kota Besar	Pembenahan sistem drainase perkotaan berbasis water charging	KemenPUPR	

PROYEK K/L DAN KEBUTUHAN PENDANAAN DI TINGKAT PUSAT

Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

Proyek K/L	KL	Rp (Juta)
Pengembangan RUU Air Minum	KemenPUPR	500
Pengembangan RUU Perusahaan Daerah	Kemendagri	500
Pengembangan NSPK Bersama tentang Prosedur pemanfaatan air tanah dan air baku di hutan, sungai, embung, dan danau	KemenPUPR (Koordinator), KLHK, KemenESDM	250
Pengembangan NSPK manajemen aset infrastruktur air minum dan sanitasi (regional, kawasan, dan komunal)	Kemenkeu (koordinator) KemenPUPR	250
Pengembangan fasilitas investasi air minum dan sanitasi	Kemenkeu (koordinator) KemenPUPR	250

LAMPIRAN

List 162 Kab/Kota Afirmasi

Kab. Aceh Singkil
Kab. Aceh Barat
Kab. Aceh Besar
Kab. Aceh Utara
Kota Sabang
Kab. Nias
Kab. Deli Serdang
Kab. Nias Selatan
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Nias Utara
Kab. Nias Barat
Kab. Kepulauan Mentawai
Kab. Solok Selatan
Kab. Pasaman Barat
Kab. Indragiri Hilir
Kab. Pelalawan
Kab. Bengkalis
Kab. Rokan Hilir
Kab. Kepulauan Meranti
Kota Dumai
Kab. Karimun
Kab. Bintan
Kab. Natuna
Kab. Kepulauan Anambas
Kota Batam
Kab. Musi Rawas
Kab. Musi Rawas Utara

Kab. Bengkulu Utara
Kab. Seluma
Kab. Lampung Barat
Kab. Pesisir Barat
Kab. Tasikmalaya
Kab. Pandeglang
Kab. Lebak
Kab. Cilacap
Kab. Trenggalek
Kab. Bondowoso
Kab. Situbondo
Kab. Bangkalan
Kab. Sampang
Kab. Sambas
Kab. Bengkayang
Kab. Landak
Kab. Sanggau
Kab. Ketapang
Kab. Sintang
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Melawi
Kab. Kayong Utara
Kab. Seruyan
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Berau
Kota Balikpapan
Kab. Mahakam Ulu

Kab. Malinau
Kab. Nunukan
Kab. Tanah Tidung
Kota Tarakan
Kab. Bolaang Mongondow
Kab. Kepulauan Sangihe
Kab. Kepulauan Talaud
Kab. Boalemo
Kab. Pohuwato
Kab. Gorontalo Utara
Kab. Banggai Kepulauan
Kab. Donggala
Kab. Toli-Toli
Kab. Buol
Kab. Parigi Moutong
Kab. Tojo Una-Una
Kab. Sigi
Kab. Banggai Laut
Kab. Morowali Utara
Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kab. Sumba Barat
Kab. Sumba Timur
Kab. Kupang
Kab. Timor Tengah Selatan

List 162 Kab/Kota Afirmasi

Kab. Timor Tengah Utara
Kab. Belu
Kab. Alor
Kab. Jeneponto
Kab. Polewali Mandar
Kab. Mamuju Tengah
Kab. Konawe
Kab. Bombana
Kab. Konawe Kepulauan
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Kab. Sumbawa
Kab. Lembata
Kab. Ende
Kab. Manggarai
Kab. Rote Ndao
Kab. Manggarai Barat
Kab. Sumba Tengah
Kab. Sumba Barat Daya
Kab. Nagekeo
Kab. Manggarai Timur
Kab. Sabu Raijua
Kota Kupang
Kab. Malaka
Kab. Maluku Tenggara Barat
Kab. Maluku Tenggara

Kab. Maluku Tengah
Kab. Buru
Kab. Kepulauan Aru
Kab. Seram Bagian Barat
Kab. Seram Bagian Timur
Kab. Maluku Barat Daya
Kab. Buru Selatan
Kota Tual
Kab. Halmahera Barat
Kab. Halmahera Tengah
Kab. Kepulauan Sula
Kab. Halmahera Selatan
Kab. Halmahera Timur
Kab. Pulau Morotai
Kab. Pulau Taliabu
Kab. Merauke
Kab. Jayawijaya
Kab. Jayapura
Kab. Nabire
Kab. Kepulauan Yapen
Kab. Biak Numfor
Kab. Paniai
Kab. Puncak Jaya
Kab. Mimika
Kab. Boven Digoel
Kab. Mappi
Kab. Asmat

Kab. Yahukimo
Kab. Pegunungan Bintang
Kab. Tolikara
Kab. Sarmi
Kab. Keerom
Kab. Waropen
Kab. Supiori
Kab. Mamberamo Raya
Kab. Nduga
Kab. Lanny Jaya
Kab. Mamberamo Tengah
Kab. Yalimo
Kab. Puncak
Kab. Dogiyai
Kab. Intan Jaya
Kab. Deiyai
Kota Jayapura
Kab. Teluk Wondama
Kab. Teluk Bintuni
Kab. Manokwari
Kab. Sorong Selatan
Kab. Sorong
Kab. Raja Ampat
Kab. Tambrauw
Kab. Maybrat
Kota Sorong
Kab. Manokwari Selatan

List 135 Kab/Kota Akses Rendah di luar daerah Afirmasi

Kab. Simeulue
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh Tenggara
Kab. Aceh Timur
Kab. Aceh Tengah
Kab. Pidie
Kab. Aceh Barat Daya
Kab. Gayo Lues
Kab. Aceh Tamiang
Kab. Nagan Raya
Kab. Bener Meriah
Kab. Pidie Jaya
Kota Subulussalam
Kab. Mandailing Natal
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Tengah
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Dairi
Kab. Samosir
Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Padang Lawas
Kab. Labuhanbatu Selatan
Kab. Labuhanbatu Utara
Kota Padang Sidempuan
Kota Gunungsitoli
Kab. Pesisir Selatan

Kab. Solok
Kab. Sijunjung
Kab. Padang Pariaman
Kab. Agam
Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Pasaman
Kab. Dharmasraya
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Rokan Hulu
Kab. Lingga
Kab. Kerinci
Kab. Merangin
Kab. Sarolangun
Kab. Batanghari
Kab. Tebo
Kab. Ogan Komering Ulu
Kab. Ogan Komering Ilir
Kab. Lahat
Kab. Musi Banyu Asin
Kab. Banyu Asin
Kab. Oku Selatan
Kab. Ogan Ilir
Kab. Empat Lawang
Kota Pagar Alam
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Kab. Belitung Timur
Kab. Bengkulu Selatan
Kab. Rejang Lebong
Kab. Kaur
Kab. Mukomuko
Kab. Lebong
Kab. Kepahiang
Kab. Bengkulu Tengah
Kab. Tanggamus
Kab. Lampung Selatan
Kab. Lampung Timur
Kab. Lampung Tengah
Kab. Lampung Utara
Kab. Way Kanan
Kab. Tulang Bawang
Kab. Pesawaran
Kab. Pringsewu
Kab. Mesuji
Kab. Tulang Bawang Barat
Kab. Bogor
Kab. Sukabumi
Kab. Cianjur
Kab. Garut
Kab. Ciamis
Kab. Purwakarta
Kab. Bandung Barat

List 135 Kab/Kota Akses Rendah di luar daerah Afirmasi

Kab. Pangandaran
Kab. Serang
Kab. Banyumas
Kab. Purbalingga
Kab. Banjarnegara
Kab. Jepara
Kab. Batang
Kab. Pemalang
Kab. Tegal
Kab. Brebes
Kab. Pacitan
Kab. Lumajang
Kab. Jember
Kab. Probolinggo
Kab. Pasuruan
Kab. Sekadau
Kab. Kotawaringin Timur
Kab. Kapuas
Kab. Barito Selatan
Kab. Barito Utara
Kab. Sukamara
Kab. Lamandau
Kab. Katingan
Kab. Pulang Pisau
Kab. Gunung Mas
Kab. Barito Timur

Kab. Murung Raya
Kab. Tanah Laut
Kab. Kotabaru
Kab. Banjar
Kab. Barito Kuala
Kab. Tapin
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Tabalong
Kab. Paser
Kab. Kutai Barat
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kutai Timur
Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Kab. Gorontalo
Kab. Bone Bolango
Kab. Banggai
Kab. Luwu
Kab. Tanah Toraja
Kab. Luwu Utara
Kab. Majene
Kab. Mamasa
Kab. Mamuju
Kab. Mamuju Utara

Kab. Kolaka
Kab. Kolaka Utara
Kab. Konawe Utara
Kab. Halmahera Utara
Kab. Pegunungan Arfak

List 15 DAS Prioritas

PROVINSI	DAS/SUNGAI	KAB/KOTA
Provinsi Sumatera Utara	SUNGAI ASAHAN TOBA	Kab. Asahan
		Kab. Dairi
		Kab. Humbang Hasundutan
		Kab. Samosir
		Kab. Simalungun
		Kab. Tapanuli Utara
		Kab. Toba Samosir
		Kota Tanjung Balai
Provinsi Riau	SUNGAI SIAK	Kab. Bengkalis
		Kab. Kampar
		Kab. Rokan Hulu
		Kab. Siak
		Kota Pekanbaru
Provinsi Sumatera Selatan	SUNGAI MUSI	Kab. Empat Lawang
		Kab. Lahat
		Kab. Muara Enim
		Kab. Musi Banyuasin
		Kab. Musi Rawas
		Kab. Ogan Komering Ilir
		Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
		Kab. Ogan Komering Ulu Timur
		Kota Pagar Alam
		Kota Palembang
Provinsi Lampung	SUNGAI SEKAMPUNG	Kota Prabumulih
		Kab. Lampung Selatan
		Kab. Lampung Timur
		Kab. Pesawaran
		Kab. Pringsewu
Provinsi Jawa Barat	SUNGAI CISADANE	Kab. Tanggamus
		Kab. Bogor
	SUNGAI CILIWUNG	Kota Bogor
		Kab. Bogor
		Kota Bogor
	SUNGAI CITARUM	Kota Depok
		Kab. Bandung Barat
		Kab. Bandung Barat
		Kab. Purwakarta
		Kab. karawang
		Kab. SUbang
		Kab. Cianjur
		Kab. Indramayu
		Kota Bandung
		Kota Cimahi

Provinsi Jawa Tengah	SUNGAI BENGAWAN SOLO	Kab. Blora
		Kab. Blora
		Kab. Boyolali
		Kab. Klaten
		Kab. Sragen
		Kab. Sukoharjo
		Kab. Wonogiri
		Kota Surakarta
Provinsi Jawa Timur	SUNGAI SERAYU	Kab. Banjarnegara
		Kab. Purbalingga
		Kab. Banyumas
		Purwokerto
		Kab. Cilacap
	SUNGAI BRANTAS	Kab. Blitar
		Kab. Jombang
		Kab. Malang
		Kab. Mojokerto
		Kab. Pacitan
		Kab. Sidoarjo
		Kab. Tulungagung
		Kota Batu
Provinsi Kalimantan Barat	SUNGAI BENGAWAN SOLO	Kota Kediri
		Kota Malang
		Kota Surabaya
		Kab. Ngawi
		Kab. Lamongan
		Kab. Bojonegoro
		Kab. Tuban
		Kab. Kapuas Hulu
Provinsi Sulawesi Selatan	SUNGAI KAPUAS	Kab. Kubu Raya
		Kab. Landak
		Kab. Melawi
		Kab. Mempawah
		Kab. Sanggau
		Kab. Sekadau
		Kab. Sintang
		Kota Pontianak
Provinsi Banten	SUNGAI JENERBERANG	Kab. Gowa
		Kab. Takalar
		Kota Makassar
	SUNGAI SADDANG	Kab. Tana Toraja
		Kab. Toraja Utara
		Kab. Enrekang
		Kab. Pinrang
		Kab. Mamasa
Provinsi Gorontalo	SUNGAI CISADANE	Kab. Tangerang
		Kota Madya Tangerang
		Kota Tangerang Selatan
Provinsi NTB	LIMBOTO	Kab. Gorontalo
		Kota Gorontalo
Provinsi NTB	SUNGAI MOYO	Kabupaten Sumbawa